

RINGKASAN

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kuantitatif, dengan metode statistik komparatif. Penelitian ini dilakukan pada seluruh Kabupaten atau Kota yang terletak di wilayah eks keresidenan Pekalongan dalam periode waktu 2012 – 2022. Judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh Alokasi Anggaran Pusat Ke Daerah, PAD, DBH Dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Di Wilayah Eks Keresidenan Pekalongan (2012 – 2022)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Belanja Modal terhadap kemiskinan di wilayah eks keresidenan Pekalongan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota yang terletak di wilayah eks keresidenan Pekalongan tahun 2012 – 2022.

Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Kemiskinan, (2) Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Kemiskinan, (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Kemiskinan, (4) Dana Bagi Hasil (DBH) tidak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Kemiskinan, (5) Belanja Modal tidak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Kemiskinan.

Implikasi dari hasil analisis di atas adalah perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam menghasilkan PAD. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong sektor-sektor unggulan di daerah, meningkatkan investasi, dan memperluas basis pajak. Pemerintah daerah perlu memperkuat perannya dalam menyusun dan melaksanakan program – program prioritas nasional, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan DAK. Pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian dalam mengalokasikan DAU dan DBH supaya lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan secara langsung maupun tidak. Pemerintah daerah perlu memperkuat perencanaan dan pengawasan terhadap Belanja Modal, dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Kata Kunci : Alokasi Anggaran, Desentralisasi Fiskal, Kemiskinan

SUMMARY

This study classified quantitative research, using a comparative statistical method. It was conducted across all districts and cities within the former residency of Pekalongan from 2012 to 2022. The title of the study is "The Impact of Central Government Budget Allocation to Regions, Local Own Revenue (PAD), Revenue Sharing Fund (DBH), and Capital Expenditure on Poverty in the Former Residency of Pekalongan (2012-2022)". The research aims to examine the effects of Local Own Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Revenue Sharing Fund (DBH), and Capital Expenditure on poverty in the former residency of Pekalongan. The data utilized in this study is derived from the realization reports of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of districts and cities located within the former residency of Pekalongan from 2012 to 2022.

The analysis results indicate that (1) Local Own Revenue (PAD) has a significant negative impact on poverty, (2) General Allocation Fund (DAU) does not have a significant negative impact on poverty, (3) Special Allocation Fund (DAK) has a significant negative impact on poverty, (4) Revenue Sharing Fund (DBH) does not have a significant negative impact on poverty, and (5) Capital Expenditure does not have a significant negative impact on poverty.

The implications of these findings suggest the need to enhance the autonomy of regions in generating Local Own Revenue (PAD) by promoting key sectors, increasing investment, and expanding the tax base. Local governments should strengthen their role in formulating and implementing national priority programs, as well as enhancing accountability and transparency in managing Special Allocation Funds (DAK). Adjustments in the allocation of General Allocation Fund (DAU) and Revenue Sharing Fund (DBH) are necessary to effectively reduce poverty both directly and indirectly. Local governments should improve planning and oversight of Capital Expenditure, and enhance accountability and transparency in its management.

Keywords: Budget Allocation, Fiscal Decentralization, Poverty